

**IMPLEMENTASI PENINGKATAN PARIWISATA BAHARI
BERADASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PESAWARAN NOMER 35 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI
KABUPATEN PESAWARAN**

¹Ahmad Ulya

¹Prodi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung,

E-mail: ahmadulya25@gmail.com

Abstract

One of the forms of tourism in Indonesia is marine tourism. The marine area is a favorite place for both local and international tourists to visit and enjoy the natural beauty of the sea. In general, marine areas are located on the coast and are located in places that have a natural, cool and healthy environment so that they can achieve an optimal recreational activity. Pesawaran Regency is one of the regencies in Lampung Province. Pesawaran Regency most of the tourist attractions are still not developed and there are no adequate facilities. In the context of structuring marine tourism areas in Pesawaran Regency in order to increase economic growth and people's welfare, environmental conservation and natural cultural resources, marine tourism in Pesawaran Regency needs to be managed properly. There are efforts in order to improve the tourism sector in Pesawaran Regency, one of these efforts is the issuance. Regulation of the Regent of Pesawaran Regency Number 35 of 2017 concerning Management of Marine Tourism Areas in Pesawaran Regency. With this regulation, it is hoped that tourism in Pesawaran Regency can become a tourist destination.

Keywords : Maritime Tourism, Regent Regulation, Pesawaran Regency

Abstrak

Bentuk pariwisata yang ada di Indonesia salah satunya yakni pariwisata bahari Kawasan bahari menjadi tempat favorit bagi wisatawan baik lokal maupun internasional untuk berkunjung menikmati keindahan alam bahari. Pada umumnya kawasan bahari berlokasi di pesisir dan terletak pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk dan sehat sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang optimal. Kabupaten Pesawaran adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesawaran sebagian besar objek wisata masih belum dikembangkan dan tidak tersedia fasilitas yang memadai. Dalam rangka penataan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,

pelestarian lingkungan dan sumber kebudayaan alam, wisata bahari di Kabupaten Pesawaran perlu di kelolah dengan baik. Terdapat upaya dalam rangka meningkatkan pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran salah satu bentuk upaya tersebut dengan dikeluarkannya. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pariwisata di Kabupaten Pesawaran bisa menjadi tujuan wisatawan.

Kata Kunci : Pariwisata Bahari, PeraturanBupati, Kabupaten Pesawaran

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang ikut berperan penting dalam usaha peningkatan pendapatan. Pembangunan industri pariwisata di suatu negara atau daerah memiliki peran penting dalam pembangunan daerah tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan terhadap suatu daerah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keindahan alam dan keanekaragaman budaya, sehingga perlu adanya peningkatan sektor pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata merupakan sektor yang dianggap menguntungkan dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu aset yang di gunakan sebagai sumber yang menghasilkan bagi Bangsa dan Negara. Kewenangan daerah untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri telah diberikan oleh Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan

yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan Sistem ini meletakkan pondasi pengembangan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.¹

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Pariwisata juga mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan, karena menawarkan potensi kepada privat sektor untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam agar mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang biasanya berada di sekitar destinasi wisata.

Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.²

Pariwisata merupakan kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.³

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh

¹RiwuKaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 172.

²Janianton Damanik. 2006. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Andi Publisher. Yogyakarta. hlm 22.

³Putu G Gayatri dan I Gde Pitana. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi Publisher. Yogyakarta. hlm 12.

masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam, Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khususnya suatu daerah tempat objek wisata itu berbeda, mendapat pemasukan dari pendapatan suatu objek wisata.⁴

Pariwisata merupakan fenomena kebutuhan akan kesehatan dan pergantian suasana terhadap keindahan alam dan khususnya bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat, Pengembangan kepariwisataan dapat membawa banyak manfaat dan keuntungan. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menyaingi kegiatan ekonomi lainnya, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait. Upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional untuk meningkatkan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa.

Mengingat luasnya kegiatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan, maka perlu dukungan dan peran serta yang aktif dari masyarakat. Undang-Undang Nomor

⁴ I Gede Pinata dan I Ketut Surya Dinarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi Publisher. Yogyakarta. hlm 2.

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menggariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimunjawa, Gili dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama.

5

Terdapat banyak bentuk pariwisata yang ada di Indonesia salah satunya yakni pariwisata bahari. Kawasan bahari menjadi tempat favorit bagi wisatawan baik lokal maupun internasional untuk berkunjung menikmati keindahan alam bahari. Pada umumnya kawasan bahari berlokasi di pesisir dan terletak pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk dan sehat sehingga dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang optimal.

Wisata bahari adalah kegiatan yang memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan diatas maupun di bawah permukaan di wilayah laut yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut.⁶

⁵<https://www.indonesia-frankfurt.de/pendidikan-budaya/sekilas-tentang-budaya-indonesia>. Dikses Pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 17.05. wib.

⁶ I Gede Oka Gautama. 2012. *Evaluasi Perkembangan Wisata Bahari Di Pantai Sanur*. Jurnal Ilmiah Pariwisata Volume 12 No. Universitas Udayana. Bali.

Wisata bahari dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, danau, bengawan, teluk atau laut. Seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, balapan mendayung, kompetisi selancar, pemotretan bawah laut dan lainnya.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa Wisata Bahari atau Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa wisata bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya; dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didatamnya taman laut.

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Dasar hukum tentang pariwisata yang ada di Indonesia yakni pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan

⁷ Nyoman S. Pendi. 1999. *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm 42-48.

perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu diperlukan sebuah standar tentang pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang ada. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dimana bahwa Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata. Sertifikasi Usaha Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.

Secara garis besar pariwisata memiliki 3 dampak besar yang dapat dikategorikan ke dalam aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Dampak yang dihasilkan pada aspek ekonomi umumnya berujung positif, sedangkan dampak lingkungan umumnya bersifat negatif dan dampak sosial umumnya merupakan kombinasi dari keduanya. Pariwisata berkelanjutan adalah tentang memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negatif.⁸

Pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan pemerintah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan

⁸<https://www.handaselaras.com/pengembangan-pariwisata-berkelanjutan-seperti-apa/> Diakses Pada Tanggal 5 April 2021 pada Pukul 21.45 wib

lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Banyak jenis wisata bahari yang terdapat di Indonesia yang sangat populer di kalangan wisatawan seperti Gili Trawangan, Raja Ampat, Wakatobi, Kepulauan Rote dan masih banyak tempat wisata bahari di Indonesia.

Pariwisata merupakan salah satu industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.⁹ Provinsi Lampung yang merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki keanekaragaman kondisi fisik, sosial, dan budaya yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata daerah. Salah satu sektor pariwisata bahari yang dapat dikembangkan di Provinsi Lampung yakni di Kabupaten Pesawaran. Potensi wisata bahari di Kabupaten Pesawaran didominasi oleh obyek wisata alam terutama Pantai dan Air terjun serta budaya, sesuai dengan topografi dan iklim.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung dalam Pasal ayat 9 dijelaskan bahwa Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi,

⁹ Salah Wahab, . 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm 5.

sosial dan budaya, sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung. Kabupaten Peawaran diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten pesawaran memiliki luas ± 117.377 ha dan jumlah penduduk sebanyak 421.497 jiwa.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran bahwa pembangunan pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaat tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluhuran dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata, akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesawaran. Diakses pada Tanggal 14 Maret 2021 Pukul 14.55 wib.

meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Kabupaten Pesawaran sebagian besar objek wisata masih belum dikembangkan dan tidak tersedia fasilitas yang memadai. Dalam rangka penataan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pelestarian lingkungan dan sumber kebudayaan alam, wisata bahari di Kabupaten Pesawaran perlu di kelolah dengan baik. Terdapat upaya dalam rangka meningkatkan pada sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran salah satu bentuk upaya tersebut dengan dikeluarkannya. Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pariwisata di Kabupaten Pesawaran bisa menjadi tujuan wisatawan seperti salah satu wisata yang sudah ada selama ini di Kabupaten Pesawaran yakni pulau pahawang.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian dengan mengumpulkan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara

konkrit dan akurat dan penulis juga menggunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peningkatan Pariwisata Bahari Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran

Wisata bahari merupakan jenis wisata minat khusus yang mengandalkan daya tarik alami lingkungan pesisir dan lautan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan wisata bahari secara langsung berupa kegiatan diving, snorkling, berenang, berperahu dan lainnya. Sedangkan wisata bahari secara tidak langsung seperti kegiatan olahraga pantai, piknik menikmati atmosfir laut dan sebagainya.

Salah satu potensi utama yang menjadi daya tarik wisata bahari adalah terumbu karang beserta sumber daya hayati laut lainnya. Keragaman spesies terumbu karang dan ikan hias merupakan obyek utama yang menciptakan panorama keindahan bawah laut bagi penyelam dan para wisatawan yang melakukan snorkling ataupun diving.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran harus serius dalam mengelola sektor pariwisata bahari, apalagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menempatkan sektor pariwisata bahari sebagai salah satu sektor ekonomi andalan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena diketahui bahwa kegiatan pariwisata merupakan suatu mata rantai yang melibatkan berbagai komponen di dalamnya

seperti, atraksi, amenitas, aksesibilitas, cenderamata, pemandu wisata, dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saifudin selaku tokoh masyarakat bahwa semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan berarti dapat dikatakan sebuah destinasi wisata tersebut berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal itu, diperlukan pengelolaan yang tepat mengikuti proses dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan sehingga para wisatawan akan datang kembali untuk mengunjungi destinasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran ataupun mengenalkannya kepada kerabat ataupun keluarganya tentang pariwisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran sehingga pariwisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran dapat meningkat.

Beberapa unsur penting yang harus dilakukan untuk menuju peningkatan pariwisata bahari di Kabupaten Pesawaran diantaranya :

1) Perencanaan

Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Dibutuhkan perencanaan yang matang untuk meningkatkan wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran baik itu bentuk kemitraan, jenis wisata yang ditawarkan, tiket wisata, fasilitas pendukung tempat wisata, peningkatan transportasi, maupun peranan masyarakat di dalam upaya meningkatkan wisata bahari.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan sebagai langkah sebuah proses dalam hal mengidentifikasi, mengklasifikasikan dan mengatur berbagai kegiatan yang terlihat. Pengorganisasian kawasan wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran harus terlihat jelas dan penuh tanggung jawab mulai dari pelaksanaan tugas tempat wisata sampai dengan penanggung jawab tempat wisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembangan dalam rangka peningkatan kawasan wisata bahari melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pariwisata serta efektifitas pengembangan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran untuk masa yang akan datang.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Dalam upaya peningkatan kawasan wisata bahari di Kabupaten Pesawaran diperlukan keterlibatan semua pihak untuk memajukan sektor wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran. Peranan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran memerlukan kreativitas dan keaktifan dalam melakukan promosi wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran. Keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan tempat wisata bahari melalui penyediaan perlengkapan wisata bahari atupun mitra usaha dalam menyediakan fasilitas pendukung wisata bahari.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa upaya di dalam peningkatan potensi wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran perlu adanya keterlibatan secara bersama-sama

antara pemerintah daerah, masyarakat maupun mitra usaha untuk dapat memberikan yang terbaik di dalam menyajikan wisata bahari kepada para wisatawan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Peningkatan Pariwisata Bahari Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran

Pengembangan pariwisata pada dasarnya ditujukan untuk dapat menjadi satu sumber pendapatan bagi daerah, disamping itu pariwisata juga diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi berkembangnya kegiatan atau usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, yang datang berkunjung sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penciptaan nilai tambah pajak, peningkatan pendapatan asli daerah serta dapat menumbuhkan sektor-sektor lainnya, seperti industri kerajinan, makanan kuliner dan lain-lain. Oleh karena itulah diperlukan adanya kesiapan pemerintah daerah dan dukungan serta partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran bahwa terdapat beberapa faktor pendukung di dalam peningkatan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran yakni :

- 1) Banyaknya Objek Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesawaran memiliki banyak objek wisata bahari yang sudah dikenal oleh masyarakat Lampung maupun luar Provinsi Lampung. Terdapat pantai-pantai indah yang bertebaran di Kabupaten Pesawaran seperti Pantai Mutun, Pantai Klara, Queen Artha, Pantai Ringgung dan lainnya. Para wisatawan dapat berlibur bersama kerabat dan keluarga dalam menikmati keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Pesawaran.
- 2) Keindahan Alam Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesawaran memiliki hampir 37 pulau yang tentunya memiliki daya tarik tersendiri di dalam memanjakan para wisatawan yang berlibur untuk menikmati wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran. Salah satu ikon destinasi wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran yakni Pulau Pahawang yang terkenal dengan keindahan pantai dan bawah lautnya. Sudah banyak yang mengakui pesonanya, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan lokal Lampung.
- 3) Keanekaragaman Hayati Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran
Kabupaten Pesawaran dengan banyaknya pulau-pulau yang bertebaran di wilayah pesisir memiliki keanekaragaman hayati laut mulai dari jenis fauna maupun terumbu karang. Keanekaragaman hayati yang kaya tersebut membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berwisata menikmati keindahan alam bawah laut yang ada di Kabupaten Pesawaran.
- 4) Dukungan Masyarakat Kabupaten Pesawaran

Masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata sulit diwujudkan apabila masyarakat lokal merasa diabaikan serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata tersebut. Kabupaten Pesawaran memiliki masyarakat yang mendukung terhadap pariwisata bahari yang ada di kabupaten Pesawaran. Bentuk dukungan dari tersebut juga dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran. Dukungan masyarakat terhadap pariwisata bahari yang ada seperti memberikan pelayanan sewa menyewa peralatan wisata bahari, seperti menyediakan gazebo, penyewaan jasa perahu dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa terdapat faktor pendukung untuk dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran. Dikarenakan Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang terdapat banyak pulau tentunya memiliki banyak objek wisata bahari yang memiliki ragam keindahan alam dan juga pesona bawah lautnya.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menarik kesimpulan terkait dengan implementasi peningkatan pariwisata bahari berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaran yakni sebagai berikut :

1. Dalam peningkatan potensi wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran perlu adanya keterlibatan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, masyarakat

maupun mitra usaha untuk dapat memberikan yang terbaik di dalam menyajikan wisata bahari kepada para wisatawan. Pengembangan wisata alam bahari memiliki peranan yang sangat penting secara ekonomis maupun ekologis. Bentuk pengelolaan pariwisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran bertujuan untuk menjaga, melindungi dan melestarikan lingkungan hidup yang ada di kawasan wisata Kabupaten Pesawaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan mengangkat citra Kabupaten Pesawaran dalam hal kepariwisataan.

2. Faktor pendukung untuk dapat meningkatkan pariwisata yang ada di Kabupaten Pesawaran yakni dikarenakan Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang terdapat banyak pulau tentunya memiliki banyak objek wisata bahari yang memiliki ragam keindahan alam dan juga pesona bawah lautnya, serta dukungan masyarakat Kabupaten Pesawaran di dalam peningkatan kawasan wisata bahari. Sedangkan faktor penghambat dalam upaya meningkatkan wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran yakni jarak tempuh yang jauh dikarenakan perjalanan yang harus dilalui memiliki infrastruktur jalananan yang kurang baik sehingga menyebabkan minimnya transportasi yang ada serta sampah yang masih berserakan hal tersebut dapat menyebabkan daya tarik wisatawan menurun.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran terkait dengan implementasi peningkatan pariwisata bahari berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Pesawaranyakni sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran banyak mempunyai obyek wisata bahari yang mempunyai potensi dan daya tarik untuk dikembangkan. Disarankan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk dapat memberikan izin kepada pihak-pihak swasta yang akan mengembangkan pariwisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran dengan melibatkan masyarakat setempat di sekitar tempat wisata sehingga masyarakat juga dapat merasakan dampak perekonomian dalam perkembangan pariwisata bahari yang ada di KabupatenPesawaran.

2. Bagi Wisatawan

Untuk wisatawan apabila mengunjungi objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran hendaknya menjaga objek wisata bahari tersebut dengan menjaga kelastarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan agar kondisi objek wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesawaran tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AJ Muljadi. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Ani Sri Rahayu. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Sinar Grafika. Malang.
- Arsyad Lincoln. 1999. *Prencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPF. Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.:* LPPM Universitas Bandung. Bandung.
- Bambang Waluyo.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ermaya Suradinata. 2006. *Otonomi Daerah Dan Paradigma Baru: Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik Dan Bisnis*.Suara Bebas. Jakarta.
- Gamal Suwanto. 2002. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi Offset. Jakarta.
- Happy Marpaung. 2002. *Pengetahuan Kepariwisata*. Angkasa. Bandung.
- I Gede Pinata dan I Ketut Surya Dinarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- I Gusti Bagus Rai Utama dan Ni Made Eka Mahadewi. 2012. *Metodelogi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*. Andi Offset. Jakarta.
- Ismayanti. 2012. *Pengantar Pariwisata*. Gramedia Widisaran. Jakarta.

- Janianton Damanik.2006. *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Kusudianto Hadinoto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Ui Press. Jakarta.
- Nurdin Hidayah. 2000. *Pemasaran Destinasi Pariwisata*. Alfabeta. Bandung.
- Nyoman S. Pendit.1999. *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Pradnya Paramita.
- Oka A Yoeti.1997. *Perencanaan Dan Pengemba Pariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Pangesti MH. 2007. *Modul Praktek Objek Wisata Alam*. Diklat Kehutanan. Bogor.
- Putu G Gayatri dan I Gede Pitana. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Andi Publisher. Yogyakarta.
- RiwuKaho. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyaas Rasyid. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Mutiara Sumber Widia. Jakarta.
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grasindo. Jakarta.
- Salah Wahab. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Samsuridjal dan Kaelany. 1997. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Mutiara Sumber. Jakarta.
- Sukarsa. 1999. *Pengantar Pariwisata*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur. Denpasar.

Talizidhuhu Ndraha. 2003. *Kybernology I Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta.

B. Peraturan Dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah bahwa Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031.

Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran Nomer 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Di Kabupaten Pesawaran.